

BAB II

RE-ESKALASI KRISIS KEMANUSIAAN SUDAN 2023

2.1. Latar Belakang Konflik Darfur (2003-2019)

Konflik berkepanjangan di Sudan bermula sejak adanya kebijakan kolonial Inggris yang secara sistematis memecah belah wilayah Sudan berdasarkan perbedaan budaya, agama, dan etnis. Sebelum adanya kebijakan kolonial Inggris ini, Sudan sudah berdiri dengan kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang kompleks, termasuk kesultanan Funj di Utara, Kesultanan Darfur di Barat dan komunitas-komunitas yang otonom di wilayah selatan (Johnson, 2003). Ketika Inggris dan Mesir memerintah Sudan secara bersama melalui *Anglo-Egyptian Condominium*, Inggris mengeluarkan kebijakan yang memisahkan antara wilayah utara dan selatan. Di bagian utara, Inggris mendorong penggunaan bahasa Arab, agama Islam, serta sistem hukum dan administrasi yang terintegrasi dengan budaya Arab-Islam. Sementara itu, di selatan, Inggris justru membatasi pengaruh Arab dan Islam dengan mendorong misi-misi Kristen, penggunaan bahasa Inggris, dan melestarikan adat istiadat lokal Afrika (Ibid.,p), sehingga kebijakan ini menciptakan dua wilayah dengan identitas yang sangat berbeda.

Pada tahun 1916, setelah Inggris menguasai Darfur, wilayah ini tidak pernah diberikan status khusus atau otonomi seperti yang diberikan kepada Sudan Selatan. Sebaliknya, Darfur diintegrasikan ke dalam administrasi Sudan Utara yang di dominasi

oleh Arab-Islam. Hal ini mengakibatkan kedudukan Darfur yang mayoritas penduduknya adalah estnis non-Arab, seperti Fur, Masalit, Zaghawa, mulai mengalami marginalisasi sistematis. Elit-elit Arab dari Khartoum memandang Darfur sebagai wilayah yang terbelakang yang perlu di dominasi oleh Arab (Waal, 2008).

Setelah merdeka pada 1 Januari 1956, Sudan dihadapkan tantangan besar dalam membangun pemerintahan yang stabil dan inklusif. Namun pembagian wilayah yang dilakukan oleh Inggris sebelumnya dan dominasi oleh elit-elit Arab di Khartoum menyebabkan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kudeta militer dengan pemerintahan sipil yang lemah, serta adanya konflik horizontal antara Utara dan Selatan yang berujung pada Perang Saudara I pada tahun 1995-1972 dan Perang Saudara II pada tahun 1983-2005 (Rolandsen, 2011).

Selain itu, struktur kekuasaan Sudan pasca-kemerdekaan yang didominasi oleh kelompok elit dari Khartoum mulai menguasai birokrasi pemerintahan, militer, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan sangat terpusat di Khartoum, sementara wilayah-wilayah seperti Darfur sering diabaikan serta alokasi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di Darfur jauh di bawah rata-rata nasional. Marginalisasi ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga politis. Representasi politik Darfur di parlemen nasional sangat kecil, dan suara-suara dari Darfur sering diabaikan.

Ketika terjadi sengketa atau keluhan dari Darfur, pemerintah pusat cenderung merespons dengan kekerasan atau mengabaikannya (Johnson, 2003).

Konflik berkepanjangan ini memicu adanya peperangan pertama antara utara dan selatan pada tahun 1955. Hal ini diakibatkan tentara selatan memberontak karena takut akan dominasi utara. Perang saudara ini berlangsung hingga tahun 1972, menyebabkan ratusan ribu korban jiwa dan pengungsian massal (Ibid., p). Perang Saudara Pertama diakhiri dengan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972 yang memberikan otonomi luas bagi Sudan selatan, termasuk pemerintahan regional sendiri, dan mengakui bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di selatan, dan jaminan kebebasan beragama. Perjanjian ini berhasil menghentikan perang selama satu dekade. Namun akibat lemahnya implementasi akan perjanjian ini, konflik-konflik masih terus berlanjut (Rolandsen, 2011).

Pada tahun 1980-an, Sudan mengalami kekeringan ekstrim dan kelaparan yang melanda seluruh wilayah, terutama Darfur. Kondisi ini memperparah persaingan antara petani non-Arab yang menetap dan penggembala Arab yang nomaden. Sementara itu, pemerintah pusat di Khartoum justru memanfaatkan ketegangan ini dengan mobilisasi milisi Arab untuk menekan komunitas non-Arab (Waal, 1989).

Pada tahun 1983, Presiden Gaafar Nimeiry, sepihak membatalkan Perjanjian Addis Ababa dan memberlakukan hukum syariah di seluruh Sudan, termasuk di selatan yang mayoritas non-Muslim. Tindakan ini memicu Perang Saudara Kedua yang terjadi pada tahun 1983–2005 antara pemerintah dan *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang. Perang ini berlangsung selama lebih dari dua dekade dan menyebabkan lebih dari 2 juta korban jiwa, sebagian besar akibat kelaparan dan penyakit (Johnson, 2003).

Pada tanggal 30 Juni 1989, Brigadir Jenderal Omar al-Bashir bersama dengan *National Islamic Front* (NIF) yang dipimpin oleh Hassan al-Turabi melancarkan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil yang lemah. Kudeta ini mengantarkan rezim otoriter terpanjang dalam sejarah Sudan, yang berlangsung selama 30 tahun hingga jatuhnya Bashir pada April 2019 (Waal, 2008). Rezim Bashir mengupayakan secara sistematis untuk mengislamkan dan mengArabkan seluruh Sudan, termasuk wilayah-wilayah non-Muslim dan non-Arab seperti selatan dan Darfur. Rezim ini memperluas pemberlakuan hukum syariah, memaksakan penggunaan bahasa Arab di semua institusi pendidikan dan pemerintahan, serta mendiskriminasi budaya dan bahasa non-Arab (Mamdani, 2009).

Bashir dan Turabi menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Mereka membangun *popular defense forces* (PDF) yang merupakan milisi rakyat yang dilatih secara militer dan deideologisasi dengan Islam. PDF kemudian menjadi cikal bakal milisi Janjaweed di Darfur. Kelompok-kelompok pemberontak di selatan dan Darfur dianggap sebagai ancaman terhadap negara Islam (Waal, 2015).

Rezim Bashir memusatkan semua kekuasaan di tangan presiden dan lingkaran kecil elite dari utara. Parlemen dijadikan simbol, partai politik oposisi ditekan, dan media massa di kontrol ketat. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia diabaikan. Secara ekonomi, rezim Bashir membangun sistem korupsi sistematis yang dikenal sebagai "*political marketplace*" (Alex de Waal, 2015). Sumber daya alam Sudan, terutama minyak yang mulai dieksploitasi secara besar-besaran pada akhir 1990-an, dialihkan untuk memperkaya elite penguasa dan membiayai mesin militer serta milisi. Khartoum menjadi pusat kekayaan dan pembangunan, sementara Darfur dan selatan tetap miskin dan terbelakang (Waal, 2015).

Sepanjang tahun 1990-an, Bashir dan rezimnya hampir sepenuhnya mengabaikan Darfur. Konflik-konflik lokal antara petani dan penggembala dibiarkan berlarut-larut tanpa mediasi yang serius. Ketika kelompok-kelompok pemberontak

Darfur seperti SLA dan JEM mulai terbentuk pada awal 2000-an, Bashir merespons dengan kekerasan ekstrim (Waal, 2008).

Pada tahun 2003, ketika SLA dan JEM melancarkan serangan terhadap instalasi militer pemerintah di Darfur, Bashir membalas dengan operasi militer skala besar yang melibatkan angkatan udara, pasukan darat, dan milisi Janjaweed. Tujuan operasi ini bukan hanya untuk menumpas pemberontakan, tetapi juga untuk membersihkan komunitas non-Arab yang dianggap sebagai basis dukungan pemberontak (Ibid., p). Kebijakan Bashir di Darfur mengakibatkan lebih dari 300.000 korban jiwa, 2,7 juta pengungsi internal, dan 250.000 pengungsi lintas batas. Pelanggaran yang dilakukan meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, penghancuran desa-desa, dan pengusiran paksa (UN Commission, 2005).

Pada tahun 2004, Pemerintah AS secara resmi menyatakan bahwa genosida telah terjadi di Darfur. Pada tahun 2005, Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa pemerintah Sudan dan Janjaweed telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, meskipun belum cukup bukti untuk genosida. Namun, pada tahun 2009 dan 2010, ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Bashir atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (ICC, 2009).

Setelah tiga dekade berkuasa, Bashir akhirnya digulingkan oleh militer Sudan pada April 2019, menyusul gelombang protes massal yang dimulai pada Desember 2018. Protes ini dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, kelangkaan roti dan bahan bakar, serta ketidakpuasan yang meluas terhadap korupsi dan represi rezim (ICG, 2010). Meskipun Bashir sudah digulingkan, dampak dari kebijakan islamisasi, sentralisasi, dan represinya masih terasa hingga saat ini. Darfur tetap berada dalam konflik komunal yang terus berulang, dan proses transisi menuju pemerintahan sipil masih menghadapi banyak tantangan (Waal, 2020).

2.2. Pecahnya Konflik Baru SAF dan RSF 2023

Sudanese Armed Forces (SAF) merupakan institusi militer tertua dan terbesar di Sudan yang dibentuk pada tahun 1952 ketika Inggris membentuk *Sudan Defence Force* (SDF) sebagai pasukan lokal untuk melindungi perbatasan dan menjaga ketertiban di bawah kekuasaan Anglo-Egyptian Condominium. Pasukan ini terdiri atas suku-suku di Sudan Utara dan Selatan dengan perwira Inggris yang memegang komando tertinggi.

Setelah Sudan merdeka pada 1 Januari 1965, SDF secara resmi ditransformasi menjadi SAF yang berada di bawah kedaulatan penuh pemerintah Sudan. Pada tahun

2011, International Institute for Strategic Studies (IISS) memperkirakan kekuatan SAF mencapai sekitar 109.300 personil yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Pasukan Pertahanan Rakyat (Popular Defence Forces).

SAF memainkan peran penting dalam politik Sudan melihat militer yang sering kali terlibat langsung dalam kudeta dan pemerintahan yang otoriter. Pada tahun 1989, Jenderal Omar Al-Bashir beserta dukungan dari faksi Islamis di dalam militer, melancarkan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil dan memaksakan penerapan hukum syariah di seluruh Sudan. Dibawah pemerintahan dan rezim Bashir yang berlangsung hingga 2019, SAF memegang kepentingan tertinggi dalam kekuasaan otoriter sekaligus menjadi instrumen represi terhadap pemberontakan di wilayah-wilayah marginal seperti Darfur, Nubian Mountains, dan Blue Nile (ICC, 2019)

Sementara itu, berbeda dengan SAF, *Rapid Support Forces* (RSF) terbentuk dari milisi pemberontak yang dibentuk oleh rezim Bashir untuk melawan pemberontakan di Darfur. Akar RSF dapat ditelusuri melalui pada milisi Janjaweed, kelompok bersenjata Arab yang dibentuk pada tahun 2000-an untuk menekan pemberontakan Sudan Liberation Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) di Darfur. Pada tahun 2013, Bashir resmi merestrukturisasi Janjaweed menjadi unit paramiliter yang lebih terorganisir, yaitu RSF. Pembentukan RSF pada awalnya

berada di bawah komando Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, dengan mandat untuk memerangi pemberontakan dan melindungi perbatasan. Bashir kemudian mengangkat Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti sebagai komandan RSF untuk memperkuat basis kekuatan Hemedti. Pada tahun 2017, parlemen Sudan mengesahkan undang-undang yang mengakui RSF sebagai pasukan militer nasional yang secara resmi berada pada naungan Angkatan Bersenjata Sudan.

Eskalasi ketegangan antara SAF dan RSF berujung pada perang terbuka pada April 2023 tidak terjadi secara tiba-tiba, namun merupakan puncak dari akumulasi persaingan yang telah lama berlangsung sejak masalah politik pasca jatuhnya Bashir. Meskipun pada tahun 2021 militer dan RSF sempat menguasai kekuasaan dengan dalih perebutan kekuasaan politik di kubu sipil, negosiasi selanjutnya selanjutnya mengenai RSF yang akan diintegrasikan ke dalam SAF justru memicu titik-titik konflik yang menyebabkan perbedaan yang tidak akan terselesaikan (International Crisis Group, 2023). Konflik utama perselisihan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan (SAF) dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang lebih dikenal dengan Hemedti, terletak pada agenda reformasi sektor keamanan. Kerangka perjanjian yang sudah disetujui mengamanatkan integrasi RSF ke dalam tentara reguler, namun kedua kubu ini memiliki visi yang berbeda terkait mekanisme pelaksanaannya. Pihak SAF

mengharapkan proses integrasi yang cepat dan menempatkan RSF di bawah komando langsung militer. Hemedti meminta periode integrasi yang panjang yaitu setidaknya mencapai satu dekade sehingga memungkinkan untuk menjaga otonomi, kekuasaan, serta jaringan otonomi besar yang akan dia kuasai (ICC, 2005). Sebelum konflik ini memuncak, ketegangan ini sempat tertahan karena kedua jenderal memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan status *quo* dan memperlambat transisi menuju pemerintahan sipil, namun perpecahan ini tidak terhindari ketika keduanya saling bersaing untuk posisi puncak.

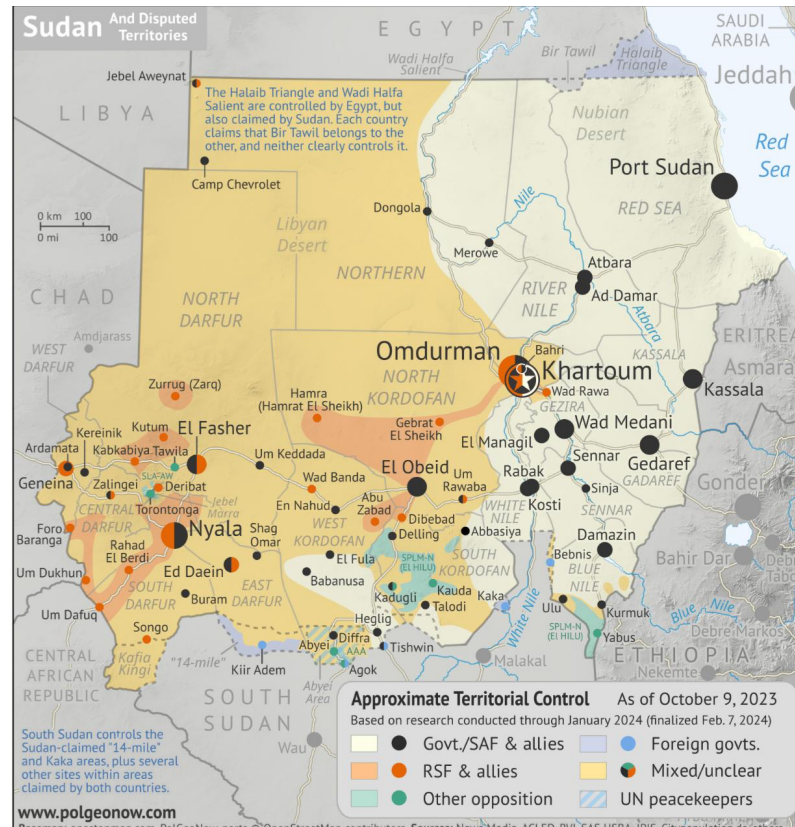
Pemicu langsung dari konflik ini adalah taktik pra-perang yang dilakukan oleh RSF pada pertengahan April 2023. Pada 13 April 2023, SAF melaporkan bahwa adanya pergerakan unit RSF yang tidak terkoordinasi menuju infrastruktur dan gedung-gedung penting di Khartoum serta wilayah-wilayah lainnya. Langkah ini dianggap ilegal oleh pemerintah dan beresiko untuk memicu konfrontasi. Situasi ini bertambah buruk sehingga pada 15 April 2023, pertempuran antara SAF dan RSF akhirnya meletus di Khartoum. Serangan ini bukan hanya terjadi di ibu kota, namun dengan cepat meluas ke berbagai wilayah lainnya. Kemudian, dengan cepat RSF mengeluarkan pernyataan yang mengklaim telah menguasai lokasi-lokasi strategis di Khartoum, termasuk Istana Presiden dan Bandara Internasional Khartoum. Namun, kendali atas aset-aset vital ini

terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pengeboman udara yang dilakukan oleh SAF terhadap posisi-posisi yang dikuasai RSF semakin memperburuk situasi sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah korban sipil seiring dengan hancurnya infrastruktur kritis di pusat-pusat perkotaan.

2.3. Dinamika Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Darfur 2023

Meletusnya konflik antara SAF DAN RSF bukan hanya mengguncang ibu kota Khartoum, namun juga memicu kekerasan yang semakin besar dibandingkan dengan kejahatan yang telah terjadi di periode sebelumnya. Kekerasan di Darfur bukan hanya perpanjangan dari perebutan kekuasaan antara dua faksi militer, namun juga dengan cepat mengambil dimensi etnis yang mengerikan, terutama setelah RSF dan milisi sekutunya berhasil menguasai sebagian besar wilayah Darfur.

El Geneina, yang menjadi ibu kota Darfur Barat, menjadi titik awal terjadinya kekerasan etnis terburuk di Darfur. Setelah pecahnya konflik di Khartoum, RSF melancarkan serangannya terhadap kota yang berpenduduk sekitar 540.000 jiwa dengan berbagai etnis di dalamnya. RSF dengan cepat menguasai kota tersebut setelah memuncaknya pertempuran singkat dengan SAF. Kejadian ini menandai dimulainya berbagai kekerasan terkoordinasi yang berlangsung sepanjang tahun 2023.



Gambar 2.1. Peta Penguasaan Wilayah SAF dan RSF di Sudan.

Sumber: Diolah oleh Evan Cetanni dan Djordje Djukic dengan *base map* oleh

onestopmap.com

Panel ahli PBB yang ditugaskan oleh Dewan Keamanan PBB turut memantau penerapan sanksi terhadap Sudan mendokumentasikan bahwa antara 10.000 hingga 15.000 orang menjadi korban atas kejadian El Geneina. Panel tersebut menggambarkan kekerasan tersebut bermotif pengusiran etnis dengan RSF dan milisi Arab sekutu yang menjadi pelaku utama. Laporan tersebut secara rinci menjelaskan bahwa serangan ini

terkoordinasi dan direncanakan kemudian di lancarkan oleh RSF dan milisi Arab sekutu dan secara sengaja menargetkan lingkungan sipil, tempat pengungsian internal, kamp IDP, sekolah, rumah sakit, bahkan menjarah kompleks PBB dan NGO.

Human Rights Watch mengeluarkan laporan yang berjudul “*The Masalit Will Not Come Home : Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity in El Geneina, West Darfur, Sudan.*” menyatakan dokumentasi paling komprehensif tentang kekerasan di Darfur Barat. Laporan ini memberikan dokumentasi mengenai RSF dan milisi Arab Sekutu yang melancarkan gelombang serangan tanpa henti terhadap lingkungan yang mayoritas dihuni penduduk non-Arab. Melalui laporan ini, dapat dilihat bahwa mulai April 2023 hingga puncaknya pada Juni 2023 saat RSF dan sekutunya melepaskan tembakan ke rombongan warga sipil yang sedang berusaha melarikan diri, RSF dan milisi Arab sekutu melancarkan gelombang serangan tanpa henti terhadap lingkungan yang mayoritas dihuni oleh penduduk non-Arab dan Masalit yang telah berlindung di pinggiran El Geneina.. Namun, pada November 2023, kekerasan ini kembali memuncak dan mencatat bahwa lebih dari setengah juta pengungsi dari Darfur barat mengungsi ke Chad.

HRW menyatakan bahwa pelanggaran serius ini menargetkan Masalit dan komunitas non-Arab lainnya dengan tujuan untuk meninggalkan secara permanen

wilayah tersebut atau disebut sebagai pembersihan etnis secara besar-besaran. Maka dengan ini, HRW menyatakan bahwa RSF dan sekutunya memiliki misi untuk menghancurkan secara keseluruhan Masalit dan komunitas non-Arab yang mengindikasikan bahwa genosida telah dilakukan di wilayah tersebut.

Setelah jeda selama beberapa bulan, maka pada November 2023, RSF melancarkan gelombang kekerasan kedua yang menargetkan wilayah Ardamata, sebuah pinggiran kota di timur laut El Geneina yang merupakan salah satu wilayah terakhir yang bermayoritaskan Masalit. RFS melancarkan aksinya dengan merebut pasukan Divisi Infanteri Angkatan Bersenjata Sudan setelah para komandan pasukan meninggalkan mereka di tengah pertempuran. Setelah menguasai pangkalan, RSF dan sekutunya mengalihkan serangan ke kamp pengungsi internal dan lingkungan sekitar.

OHCHR melaporkan bahwa warga sipil Masalit mengalami teror enam hari yang dilakukan oleh RSF dan sekutunya dengan korban yang tewas mencapai sekitar 1.300 orang, 2000 orang mengalami luka-luka dan 500 orang ditahan. Hal ini menyebabkan banyak mayat-mayat yang dibiarkan berserakan di sepanjang jalan Ardamata selama berhari-hari. Teror ini diikuti juga dengan dibakar dan diarahnya banyak rumah-rumah di wilayah tersebut.

Salah satu aspek paling mengerikan dari re-eskalasi konflik yang terjadi di Darfur adalah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis sebagai senjata perang. OHCHR juga melaporkan bahwa banyak perempuan dan anak perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual di kamp pengungsi Ardamata dan di beberapa rumah. RSF dan sekutunya juga dilaporkan melakukan penjarahan di beberapa kamp IDP serta lingkungan Al-Kabri yang semuanya dihuni oleh komunitas Masalit.

2.4 Dampak Kemanusiaan Re-eskalasi Konflik 2023

Re-eskalasi konflik bersenjata antara SAF dan RSF sejak 15 April 2023 telah membawa rakyat Sudan, khusus warga Darfur, ke dalam salah satu krisis kemanusiaan paling buruk. Masyarakat sipil yang tidak berdiri di garis mana pun menjadi korban utama kekerasan, kelaparan, dan pengungsian massal. Anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat dalam tragedi ini.

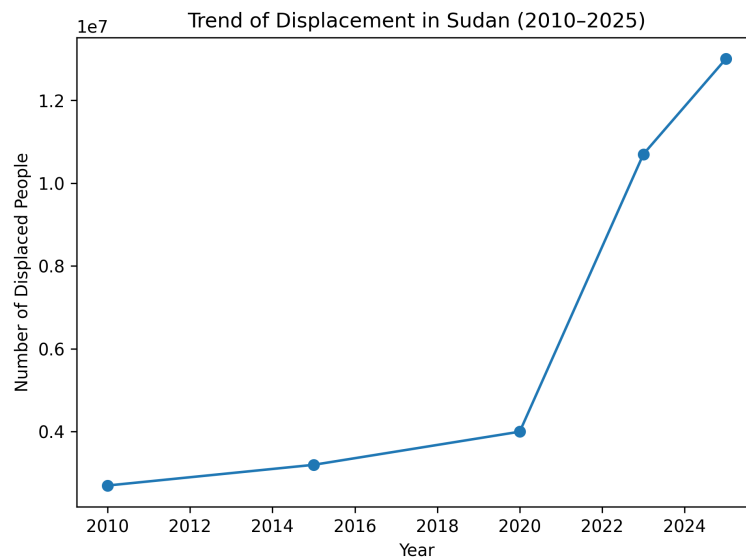
Angka korban jiwa di Sudan telah mencapai tingkat mengkhawatirkan hingga paruh pertama 2025. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) mencatat bahwa kurang lebih 3,384 warga sipil tewas dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2025 yang merupakan suatu angka yang mewakili hampir

80% dari korban sipil yang terdokumentasi sepanjang tahun 2024. Korban jiwa di Darfur diperkirakan mencapai ribuan orang dan dalam enam bulan pertama konflik hingga Agustus 2023, UNHCR melaporkan bahwa hampir 4.000 warga sipil tewas dan 8.400 lainnya terluka, dengan sebagian besar korban ditargetkan berdasarkan etnis mereka, terutama di Darfur Barat. Lebih dari 29 kota, desa, dan pemukiman hancur akibat penjarahan dan pemakaman massal, dan kurang lebih 139 fasilitas sipil termasuk rumah sakit, sekolah, dan pasar rusak atau dijarah.

Kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara, menjadi episentrum kekerasan paling mematikan setelah direbut oleh RSF pada 26 Oktober 2025. Pemerintah Sudan melaporkan bahwa lebih dari 2.000 warga sipil tewas akibat serangan RSF di kota tersebut. Sementara itu, Sudan Doctors Network memperkirakan total korban tewas di El Fasher sejak pengepungan dimulai pada Mei 2024 telah melampaui 14.000 jiwa. Para korban termasuk pasien dan korban luka yang dieksekusi di rumah sakit. Kamp pengungsi Zamzam, yang menampung sekitar 500.000 orang pengungsi internal di selatan El Fasher, diserang RSF pada April 2025, mengakibatkan lebih dari 1.000 warga sipil tewas dalam tiga hari. Secara total, Sudan Doctors Union telah melaporkan bahwa lebih dari 522.000 bayi telah meninggal akibat malnutrisi antara pecahnya perang dan Januari 2025. Sayangnya, angka-angka ini kemungkinan masih jauh di

bawah kenyataan sebenarnya, karena banyak kematian di daerah konflik tidak tercatat akibat runtuhnya sistem.

Konflik ini telah menciptakan krisis pengungsian terbesar di dunia. Pada Oktober 2025, sekitar 14 juta orang atau lebih dari seperempat populasi Sudan telah terusir dari rumah mereka. Angka ini mencakup sekitar 10,5 juta pengungsi internal (IDP) dan 4,35 juta pengungsi lintas batas yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Di antara pengungsi internal, lebih dari setengahnya adalah anak-anak. Distribusi mereka terkonsentrasi di Darfur, dengan 1,84 juta di South Darfur, 1,75 juta di North Darfur, dan 978.000 di Central Darfur. Di luar perbatasan, pengungsi dan pencari suaka telah tersebar di Mesir, Chad, Sudan Selatan, Ethiopia, Uganda, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Kamp-kamp di Chad dan Sudan Selatan telah beroperasi jauh di atas kapasitas, dengan ribuan pengungsi tidur di bawah pohon di pinggir jalan akibat kekurangan tempat tinggal. Banyak warga Darfur yang terusir untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Pada akhir 2025, sekitar 3,5 juta orang telah kembali ke Khartoum dan negara bagian lainnya, baik dari dalam Sudan maupun dari negara tetangga—namun mereka kembali menghadapi kehancuran total.



Gambar 2.2. Diagram Perkembangan Pengungsi Darfur

Salah satu aspek paling mengerikan dari konflik ini adalah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Pengepungan yang diberlakukan dengan sengaja terhadap Al Fasher, Kadugli, dan Dilling secara sistematis memblokir masuknya makanan dan pasokan bantuan, yang diperparah oleh serangan terhadap pedagang dan kehancuran pasar. Laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) September 2025 memperkirakan bahwa 21,2 juta orang (45 persen populasi Sudan) menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, dengan 375.000 orang mengalami kondisi kelaparan (IPC Fase 5) dan 6,3 juta lainnya dalam kondisi darurat (IPC Fase 4). Kelaparan telah dikonfirmasi terjadi di El Fasher (Darfur Utara) dan Kadugli (Kordofan Selatan), sementara kondisi di Dilling dilaporkan sama parahnya.

Di Kamp Zamzam, warga terpaksa memakan kulit kacang karena semua stok makanan telah habis akibat blokade RSF

Kekerasan seksual telah digunakan secara sistematis sebagai senjata perang di Darfur. Laporan OHCHR (Desember 2025) mendokumentasikan bahwa di Kamp Zamzam, setidaknya 104 orang (termasuk 75 perempuan, 26 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki) mengalami pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, dan perbudakan seksual, yang "tampaknya sengaja digunakan untuk menimbulkan teror pada komunitas." Laporan yang sama juga mencatat bahwa 66 insiden kekerasan seksual terkait konflik melibatkan setidaknya 104 korban, dengan semua kecuali tiga korban adalah perempuan, termasuk lebih dari dua lusin yang masih di bawah umur. Pada paruh pertama 2025, setidaknya 30 pekerja kemanusiaan dan kesehatan tewas dalam serangan, termasuk dalam serangan yang ditargetkan. Sepanjang tahun 2025, total 92 pekerja bantuan tewas, terluka, diculik, atau ditahan; terdapat juga 65 serangan terhadap fasilitas kesehatan yang tercatat. Lebih dari 10 juta anak tidak bersekolah karena ruang kelas hancur, diduduki, atau tidak aman untuk dijangkau. Hampir 19 juta orang tidak memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang layak, dan Sudan menghadapi wabah kolera yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih dari 70.000 orang terinfeksi pada tahun 2025 saja